

ABSTRAK

TINJAUAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN ARSIP DAERAH (Studi pada Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung)

Oleh

HAFIDZ ANDRIANTO

Kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian baik oleh masyarakat umum, organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta dan masyarakat masih belum mengetahui dan memahami arti pentingnya manfaat Arsip dalam kehidupan sehari-hari, bagi pribadi maupun organisasi. Arsip seringkali di posisi sebagai barang yang tidak berharga bahkan dianggap sebagai sampah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan Arsip daerah? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dan yang mendukung pengelolaan dan pengamanan Arsip daerah? 3) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pengamanan Arsip daerah?. Dalam melakukan penelitian dilakukan pendekatan secara normatif dan empiris, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung hanya mengelola Arsip Inaktif dari Lembaga/Kantor/Dinas/Satuan Unit Kejar di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung. Arsip Inaktif yaitu frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan sudah menurun. Sedangkan Arsip Aktif dikelola oleh Unit Pengolah yang ada pada Lembaga/Kantor/Dinas/Satuan Unit Kerja masing-masing, mengingat arsip aktif masih secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai bahan bukti kebijakan pimpinan.

Dalam melakukan pengelolaan arsip inaktif, Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung masih berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kearsipan. Adapun sasaran dalam penanganan arsip inaktif adalah penyelamatan dan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna administrasi aparatur negara serta bahan bukti pertanggung jawaban nasional/pemerintah.

Kata kunci :Pertanggung jawaban, Pengelolaan, Pengamanan, Arsip Daerah